

JURNAL
EFEKTIFITAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TERHADAP PENYIDIKAN DALAM KEKERASAN
TERHADAP ANAK LINGKUP RUMAH TANGGA
DI WILAYAH SLEMAN



Diajukan Oleh :

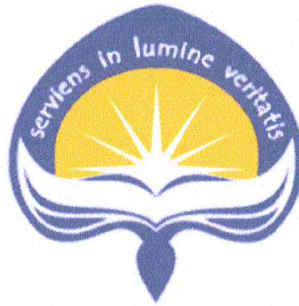
HOTMAN TULUS PARASIAN MARBUN

NPM : 120510947
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2015

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**EFEKTIFITAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TERHADAP
PENYIDIKAN DALAM KEKERASAN TERHADAP ANAK LINGKUP RUMAH
TANGGA DI WILAYAH SLEMAN**



Diajukan Oleh :

HOTMAN TULUS PARASIAN MARBUN

NPM : 120510947
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing

(Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum)



**FAKULTAS
HUKUM**

**Mengesahkan
di Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Endro Susilo, S.H, LLM

ABSTRACT

This study, entitled the effectiveness of Act No. 23 of 2004 on the investigation of child abuse in the domestic sphere sleman. The background problem is the investigation to prevent any and protecting victims of child abuse. Problem formulation of this paper is What are the constraints faced by police investigators in the implementation of child abuse according to Law No. 23 of 2004; How can the effectiveness of investigations into child abuse in the domestic sphere to implement Law No. 23 of 2004 in Sleman region. It is a normative legal research that focuses on the positive legal norms in the form of legislation relating to the object of research. This study on women and child protection unit in Sleman Police. These results indicate that a) Ignorance of the victims that they experienced violence is a criminal act. b) Victims of fear because of threats from the perpetrator. c) Sleman Police have difficulties in obtaining reports. d) Domestic violence is a disgrace the family so that the other party does not need to know or even interfere with existing problems in it. Thus only be resolved within the family only. e) The community considers that violence against children is a natural thing, because for the people it is a choice in educating children. This obstacle can be overcome to disseminate to the public by providing an understanding that violence against children is a crime. e) Lack of coordination in cooperation between police and Child Protection Institution (LPA) Social Service and Non Governmental Organization (NGO) and related institutions. The fate of the protection of children is not so considered in both the external and internal oversight, and lack of coordination between the public and the police in the process of making file Examination (BAP). f) Lack of time restrictions in securing children's time is given only for one week, while the handling of children who are abused can last longer and can not be measured deadline. Furthermore, the effectiveness of the investigation conducted in Sleman Police within the scope of domestic child abuse in the area of Sleman.

Keywords: effectiveness, child abuse, the investigator, the scope of the household

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pada pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut harus memiliki kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. ¹.

Menurut ketentuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 terdapat pada pasal 1 ayat 1 bahwa perbuatan terhadap

¹ Guse prayudi, 2012, *Berbagai Aspek Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga*, Merkid Press,Yogyakarta, hlm. 1

seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sehingga dampak kekerasan dalam rumah tangga sangat kompleks dan mempengaruhi ketahanan individu maupun ketahanan keluarga. .

Penegakan hukum terhadap kekerasan anak dalam lingkup rumah tangga itu penting karena akan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan anak tersebut. Dari sinilah perlunya adanya peran kepolisian untuk berperan sebagai perlindungan apabila dikemukakan adanya kasus tentang kekerasan anak. Kepolisian sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum, tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga sehingga tidak memunculkan pandangan masyarakat yang menganggap bahwa aparat penegak hukum terkesan acuh tak acuh terhadap masalah kekerasan anak.

Adapun tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pelanggaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Penyidikan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga di Wilayah Sleman”**

B. Rumusan Masalah

- a. Apa sajakah kendala yang dihadapi penyidik polisi dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004?
- b. Bagaimana efektifitas penyidikan dalam kekerasan terhadap anak lingkup rumah tangga di wilayah sleman

2. PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Latar Belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada awalnya, terutama sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini bahwa seseorang korban kekerasan dalam rumah tangga sulit akan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja pada saat itu belum ada payung hukumnya, namun di sisi lain juga adanya

pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan.²

Bangsa Indonesia patut merasa bersyukur, karena pada tanggal 22 September 2004 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga.

Lahirnya UU PKDRT merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Di samping itu Undang-Undang ini juga mengatur tentang langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan.³

Latar belakang diberlakukannya Undang-Undang ini adalah sebagaimana dapat dibaca dalam bagian menimbang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004, yang antara lain menyatakan :

“Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”

Dengan demikian, terlihat ada perubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tidak semata-mata merupakan urusan privat, tetapi juga menjadi masalah publik, dari urusan rumah tangga menjadi urusan publik yang diatur melalui Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga dan akan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini bertujuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 Undang-Undang Pelanggaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004 adalah:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

² Guse Prayudi, *Op.Cit.*, hlm 1-3

- c. Menindak perilaku kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

B. Tinjauan tentang Penyidikan Polisi Republik Indonesia

1. Tugas dan Wewenang Polisi

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan ketiga tugas pokok tersebut ini menggambarkan urutan prioritas maupun hirarki, namun ketiga-tiganya sama penting.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkunganhidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjungtinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas pokok tersebut kepolisian mempunyai tugas yang disebut tugas pembinaan, yakni tugas dalam rangka memberikan bimbingan teknis maupun taktis dalam menjalankan fungsi kepolisian. Tugas pembinaan ini diberikan kepada lembaga-lembaga atau masyarakat potensial yang berdasarkan Undang-Undang diberikan tugas dan tanggung jawab menjalankan fungsi kepolisian yang dalam istilah lain sebagai alat-alat kepolisian, polisi dibantu oleh :

- a. Kepolisian khusus
- b. Penyidik pegawai negeri sipil.
- c. Bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.⁴

2. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Menurut pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan karena karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan tindak pidana;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan ahli;
- j. Mengadakan penghentian penyidik.

Sedangkan pada pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Pasal 6 ayat (2) KUHAP mencantumkan syarat-syarat untuk diangkat menjadi penyidik diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP berdasarkan pasal 2 dan pasal 3, dapat disimpulkan bahwa syarat menjadi Penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat Penyidik Penuh Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi kepangkatan dan pengangkatan sebagai berikut:

⁴ Sadjijono, 2005, *Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laksabang, Yogyakarta, hlm.123

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat IPDA ;
- 2) Berpangkat Bintara di bawah Bripda apabila dalam sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

b. Pejabat Penyidik Pembantu

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Bripda;
- 2) Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan Tk I/B);
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI, atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Penyidik pembantu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Bintara Polisi;
 - b) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan;
 - c) Mempunyai kecakapan dan kemampuan baik psikis maupun fisik untuk melakukan tugas penyidikan;
 - d) Berkelakuan baik atau tidak tercela;

Untuk menunjang tugas utama penyidik agar berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi.
- 8) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan

penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya⁵

Penyidikan in concreto dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.⁶

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁷

Dalam hal ini kepolisian juga memiliki unit yang bernama unit pelayanan perempuan dan anak yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan korban kejahatan dan penegakkan hukum bagi pelakunya termasuk kekerasan anak dalam lingkup rumah tangga. Dalam **peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor polisi 10 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) lingkungan Kepolisian Republik Indonesia** pada pasal 3 bahwa Unit

⁵ <https://blog.djarumbeasiswaplus.org/agustiansiagian/2011/10/26/ctinjauan-umum-tentang-tugas-pokok-fungsi-dan-kewenangan-penyidik/>. Diakses tanggal 15 September 2015, jam 08.45 wib

⁶ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2015, jam 15.55 Wib

⁷ Adami Chazawi, 2005 *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang Bayumedia Publishing, hal.380-381

PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Adapun kedudukan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) tingkat Mabes Polri Unit PPA berkedudukan dibawah Direktorat I/ Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri. Tingkat Polda Unit PPA berkedudukan dibawah satuan operasional Dit Reskrim/ Dit Reskrim Um Polda. Tingkat Polres Unit PPA berkedudukan dibawah Sat Reskrim Polres. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terdiri dari unsur pimpinan berupa kepala unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) dan Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan berupa perwira unit perlindungan (Panit Lindung) serta Perwira Unit Penyidik (Panit Idik).

Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak diatur dan dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak meliputi :

- a. Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana.
- b. Membuat Laporan Polisi.
- c. Memberikan konseling.
- d. Mengirimkan korban ke PPT atau Rumah Rakit terdekat.
- e. Pelaksanaan penyidikan perkara.
- f. Memintakan visum.
- g. Memberikan penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak dan kewajibannya.
- h. Menjamin kerahasiaan info yang diperoleh
- i. Menjamin keamanan dan keselamatan korban
- j. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/rumah aman.
- k. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral.
- l. Memberitahukan perkembangan penanganan kasus kepada pelapor.
- m. Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur.

C. Tinjauan tentang Kekerasan anak dalam lingkup Rumah Tangga

1. Pengertian anak

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa akan datang. Agar anak kelak dapat memikul tanggung jawab secara optimal, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spritual. Pada kenyataannya anak lebih sering menjadi obyek penderita disadari atau tanpa disadari oleh pendidik (orangtua, guru dan pengasuh), sehingga

kekerasan pada anak berlangsung secara terus menerus dan berakibat kepada krisis generasi.⁸

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan pengertian anak antara lain :

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin;

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 memberikan batasan pengertian anak yaitu anak adalah seseorang yang belum 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa perbedaan- perbedaan tersebut pada umumnya terletak pada pembatasan usia seseorang yang dapat dikategorikan sebagai anak-anak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penentuan batasan pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia mengacu pada faktor usia seseorang

2. Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah kata yang biasa diterjemahkan dari violence yang dalam bahasa latin disebut violentina. Violence erat berkaitan dengan gabungan kata latin “vis” (daya, kekuatan) dan “latus” berasal dari ferre (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan.⁹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tercantum bentuk bentuk tindak kekerasan yang dituangkan kedalam pasal 6 dan pasal 9 yaitu :

- a. Kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. (Pasal 6)
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 7)
- c. Kekerasan seksual yaitu :
 - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

⁸ Yayasan Kakak, *Loc.cit* hlm 23

⁹ Fran Van djik, 1999. *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Wacana Realita*, Pusat kajian dan perlindungan anak, Medan, hlm 19

- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan / atau tujuan tertentu. (Pasal 8)
 - 3) Penelantaran rumah tangga, yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
3. Bentuk-bentuk Kekerasan Anak.

Terry E. Lawson, psikater anak yang dikutip Rakhmatdalam Baihaqi (1999 : XXV) mengkalfisikan kekerasan terhadap anak (child abuse) menjadi empat bentuk yaitu : *emotional abuse*, *verbal abuse*, dan *sexual abuse*.¹⁰ Sementara itu, Suharto (1997 : 365-366) mengelompokkan *Chilid Abuse* menjadi *Physical abuse* (Kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan seksual, dann *social abuse* (kekerasan secara sosial).¹¹ Keempat bentuk *chil abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut :¹²

1. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, lumut, pipi, dada, perut, punggung, atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya seperti rewel, nakal, melawan orang tua.
2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan penyampaian kata kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika di dekati, takut ke luar rumah, dan takut bertemu dengan orang lain.
3. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *eshibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*Incest*, Perkosaan, eksploitasi seksual).
4. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberi pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi dapat menunjukkan sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.

4. Faktor-Faktor Terjadi Kekerasan Anak Dilingkup Rumah Tangga.

¹⁰ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak Edisi Ke III*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm 47

¹¹ Ibid

¹² Ibid hlm 48

Terdapat *beberapa* faktor penyebab kekerasan terhadap anak di lingkup rumah tangga . Salah satu penyebab kekerasan terhadap anak adalah karena pengaruh keluarga, pengaruh ekonomi, maupun pengaruh genetika. Kekerasan dalam keluarga terjadi disebabkan peran orang tua yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pandangan yang keliru tentang posisi anak dimana anak sering dianggap tidak tahu apa-apa, sehingga anak harus menurut dengan kemauan orang dewasa di dalam rumahnya. Tekanan ekonomi dalam rumah tangga juga kerap kali menimbulkan kekerasan terhadap anak.¹³

Dengan *adanya* penyebab ini dapat disimpulkan bahwa penyebab itu bisa terjadi terjadi pada orang- orang terdekat si anak tersebut dan cenderung kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan oleh orang tua.

5. Dampak terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak tentunya memiliki dampak, ada hal yang rentan yang membuat dampak kekerasan itu terjadi menurut Bagong Suyanto dampak tersebut yaitu:¹⁴

- a. Anak akan belajar untuk menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah apapun.
- b. Anak mengalami gangguan emosional atau gangguan emosional atau gangguan psikologis (kejiwaan) tertentu, misalnya: takut dengan orang, mengasingkan diri, gangguan kepribadian, gangguan keseimbangan emosi.
- c. Ketika anak menjadi orang tua, dia akan cenderung menggunakan kekerasan pula pada anaknya.
- d. Gangguan kecerdasan, penelitian di bidang neuropsycholgy (ilmu yang mempelajari keterikatan antara syaraf dengan kondisi kejiwaan) menunjukkan adanya kecemasan pada anak akan menyebabkan otak menghasilkan sejenis hormon yang merusak sinapis (terikat) antar syaraf pada otak. Hasilnya semakin banyak kecemasan maka anak akan semakin bodoh. Kekerasan akan selalu menimbulkan kecemasan pada anak, sehingga semakin banyak kekerasan akan semakin tinggi kecemasan pada anak.
- e. Kurangnya motivasi atau harga diri pada si anak yang menjadi korban.
- f. Problem-problem kesehatan mental, misalnya: kecemasan berlebihan, problem dalam hal makan, susah tidur. Sakit yang serius dan luka-luka parah sampai cacat permanen: patah tulang, radang karena infeksi, mata lebam dan sebagainya, termasuk juga sakit kepala, perut, otot, dan lain-lain yang bertahun-tahun meski bila ia tidak lagi dianiaya.
- g. Mengembangkan perilaku agresif (suka menyerang) atau jadi pemaarah, atau bahkan sebaliknya menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan.
- h. Mimpi buruk dan serba ketakutan. Selain itu, kehilangan nafsu makan, tumbuh dan belajar lebih lamban, sakit perut, asma, sakit kepala dan lain-lain.

¹³ <http://bakohumas.kominfo.go.id/news>, diakses pada tanggal 16 oktober 2015 jam 11.30 WIB

¹⁴ Bagong Suyanto, 2000, Sri Saniuti Hariadi dan Priyono Adi Nugroho, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Luftansah Mediatama, Surabaya, hlm 128

i. Kematian

3. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kendala yang dihadapi oleh penyidik di Polres Sleman dalam penanggulangan terhadap kekerasan anak dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi :
 - a. Ketidaktahuan korban bahwa tindakan kekerasan yang dialaminya merupakan perbuatan pidana.
 - b. Korban takut karena ancaman dari pelaku.
 - c. Polres Sleman mengalami kesulitan dalam memperoleh laporan
 - d. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib keluarga sehingga pihak lain tidak perlu tahu atau bahkan mencampuri permasalahan yang ada di dalamnya. Sehingga hanya diselesaikan dalam lingkup keluarga saja.
 - e. Masyarakat menganggap bahwa kekerasan terhadap anak merupakan hal yang wajar, karena bagi masyarakat itu merupakan pilihan dalam mendidik anak.
 - f. Kurangnya koordinasi dalam kerjasama antara polisi dengan Lembaga Pelindungan Anak (LPA) Dinas Sosial maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta lembaga yang terkait. Nasib perlindungan pada anak tidak begitu diperhatikan baik dalam pengawasan eksternal maupun internal, dan kurangnya kordinasi antara masyarakat dan polisi dalam proses pembuatan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP)
 - g. Kurangnya pembatasan waktu dalam pengamanan anak yang waktunya hanya diberikan selama satu minggu, sedangkan penanganan terhadap anak yang mengalami kekerasan dapat berlangsung lama dan tidak dapat diukur batas waktunya.
2. Penyidikan di Polres Sleman dalam penanggulan kekerasan terhadap anak tidak efektif disebabkan masih adanya kendala kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan di Pores Sleman. Ini menyebabkan karena penyidikan yang dilakukan hanya berlandas pada aspek peraturan peraturan yang ada sehingga polisi akan bertindak dan menanggulangi permasalahan apabila adanya laporan. Dalam proses penyidikan tersebut harus meningkatkan kinerja polisi dalam penyidikan khususnya kekerasan terhadap anak.

B. Saran

1. Untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam proses penyidikan kekerasan anak di wilayah sleman hendaknya penyidik memerlukan kordinasi yang lebih baik dalam rangka mencari solusi yang terbaik bagi para pihak baik kepada tersangka (orang tua/orang terdekat anak) dan anak (korban). Dengan mempertimbangkan bahwa anak masih butuh kasih sayang, masih ketergantungan terhadap orang tua maka dipandang perlu untuk memberikan perlindungan hukum dan perlindungan terhadap perkembangan mental anak/psikologi anak yang bersangkutan.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada orang tua mengenai cara mendidik anak dan cara menghukum anak apabila salah
3. Perlu memberikan sosialiasi kepada elemen masyarakat mengenai dampak kekerasan anak bila dilakukan
4. Polisi diharapkan lebih berperan aktif untuk menindak lanjuti masalah kekerasan anak dan mencari alat bukti yang kuat sehingga kekerasan anak dapat diproses sampai tingkat pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2005 *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang Bayumedia Publishing

Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak Edisi Ke III*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm 47

Bagong Suyanto, 2000, Sri Saniuti Hariadi dan Priyono Adi Nugroho, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Luftansah Mediatama, Surabaya

Fran Van djik, 1999. *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Wacana Realita*, Pusat kajian dan perlindungan anak, Medan

Guse prayudi, 2012, *Berbagai Aspek Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga*, Merkid Press, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *fungsi Penegakan Hukum*, Jakarta

Sadjijono, 2005, *Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laksabang, Yogyakarta.

Prof. R. Soerbakti, S.H, 1984, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, PT. Pradyna Paramita, Jakarta.

Yayasan Kakak, 2000, *Anak yang dilacurkan : Masa Depan Yang tercampakkan*, Pusataka Pelajar hlm 6

Yan Pramudaya Puspa, 1997, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, CV Aneka Semarang, hlm 645

<https://blog.djarumbeasiswaplus.org/agustiansiagian/2011/10/26/ctinjauan-umum-tentang-tugas-pokok-fungsi-dan-kewenangan-penyidik/>.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html>,

<http://bakohumas.kominfo.go.id/news>,